

***DIGITAL DIVIDE* PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER**

Nana Mulyana¹, Anisa Utami^{2*} & Intan Fitri Meutia³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung

^{1,2,3}Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandarlampung, Indonesia

*Korespondensi: anisasutarsyah@gmail.com

Abstract

Indonesia memiliki masalah yang cukup serius dalam pemerataan teknologi, kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diterapkan di Kabupaten Pesawaran menjadi perhatian karena beberapa perbedaan dengan daerah-daerah lainnya yang juga melaksanakan UNBK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kesenjangan Digital yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya pelaksanaan UNBK di SMPN 25 Pesawaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kesenjangan digital terjadi di SMPN 25 Pesawaran yaitu Pertama, faktor teknologi yang terkait dengan Jalan ke akses telekomunikasi, serta faktor siswa sebagai pengguna yang belum melek akan TIK. Kedua, kondisi sosial ekonomi masyarakat di SMPN 25 Pesawaran masih banyak yang berada pada posisi menengah ke bawah sehingga TIK belum menjadi kebutuhan yang mendasar.

Keywords: Digital Divide, UNBK, High School

59

Abstrak

Indonesia memiliki masalah yang cukup serius dalam pemerataan teknologi, kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diterapkan di Kabupaten Pesawaran menjadi perhatian karena beberapa perbedaan dengan daerah-daerah lainnya yang juga melaksanakan UNBK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kesenjangan Digital yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya pelaksanaan UNBK di SMPN 25 Pesawaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kesenjangan digital terjadi di SMPN 25 Pesawaran yaitu Pertama, faktor teknologi yang terkait dengan Jalan ke akses telekomunikasi, serta faktor siswa sebagai pengguna yang belum melek akan TIK. Kedua, kondisi sosial ekonomi masyarakat di SMPN 25 Pesawaran masih banyak yang berada pada posisi menengah ke bawah sehingga TIK belum menjadi kebutuhan yang mendasar.

Kata kunci: Kesenjangan Digital, UNBK, Sekolah Menengah

PENDAHULUAN

Kesenjangan digital (*digital divided*) menurut OECD atau *Organisation for Economic Cooperation and Development* adalah kesenjangan di antara individu, rumah tangga, bisnis dan area geografis pada level perbedaan sosial ekonomi yang berhubungan dengan kesempatan untuk mengakses informasi dan teknologi informasi (TI) serta penggunaan internet untuk berbagai aktivitas sehari-hari (Zulham, 2014).

Perkembangan teknologi informasi di era global kini sudah tidak bisa dihindari, perkembangan yang relative pesat dan membawa begitu banyak perubahan baik perubahan dalam sisi positif maupun perubahan negative yang tak kalah banyaknya. Berbagai bentuk produk yang dihasilkan dari teknologi itu sendiri hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam hal ini masyarakat secara tidak langsung mengikuti arus perkembangan zaman jika tidak ingin terbelakang secara teknologi atau biasa disebut dengan istilah *gaptek* (gagap teknologi). Belakangan ini teknologi khususnya teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dikalangan masyarakat modern dari yang tua hingga muda yang membuat teknologi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia pada era ini.

Dikutip dari media online *katadata.co.id* Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dengan kesenjangan teknologi informasi yang cukup besar, 34 provinsi di Indonesia dibagi menjadi 4 kategori yaitu tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 9 provinsi dinyatakan tinggi, 5 provinsi sedang, 8 provinsi rendah, dan 9 provinsi sangat rendah. Penghitungan pembangunan teknologi menggunakan 11 indikator dengan 3 subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian, empat pertama dengan indeks paling tinggi yaitu DKI Jakarta. 9 provinsi yang masuk kategori sangat rendah antara lain Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pada konteks provinsi Lampung merupakan provinsi diujung Pulau Sumatra yang jaraknya relative cukup dekat dengan kota besar dan juga merupakan ibu kota Negara Indonesia sekaligus kota yang memiliki indeks pembangunan teknologi paling tinggi dibandingkan kota-kota lainnya, memiliki indeks pembangunan teknologi yang sangat rendah (BPS, 2018). Secara sederhana, dapat dikatakan adanya kesenjangan digital antara wilayah-wilayah di Indonesia terutama provinsi Lampung. Kesenjangan digital dapat diartikan sebagai perbedaan akses terhadap Teknologi

Namun demikian, provinsi Lampung tetap terus mengupayakan mengembangkan penerapan teknologi modern dari berbagai sektor dalam berbagai bidang demi kemajuan daerah Lampung. Salah satunya adalah pada sektor pendidikan. Pada sektor ini, pemerintah daerah Lampung menerapkan program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang merupakan program pemerintah pusat. UNBK pertama kali digunakan secara terbatas pada tahun 2014 dan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. UNBK adalah salah satu sistem yang mengikuti perkembangan zaman. Dibandingkan dengan mengisi kertas ujian, CBT sangat jelas jauh lebih praktis. Selain itu, tindak kecurangan pun dapat diminimalkan karena soal-soal bisa diacak sesuai dengan jumlah siswa. Dari segi anggaran dan distribusi, UNBK lebih efisien. Soal-soal ujian tidak perlu dicetak dan didistribusikan secara manual, cukup disinkronisasi dari server pusat ke sekolah-sekolah. Begitu pula dengan lembar jawaban. Jadi, tidak ada istilah soal ujian dan lembar jawaban terlambat dikirim, rusak atau hilang. Satu lagi kelebihan dari CBT yaitu hasil ujian dapat diketahui lebih cepat. Sistem *online* memangkas jaringan distribusi serta menghemat waktu untuk mengoreksi seluruh jawaban siswa, sehingga siswa tidak perlu menunggu lama sampai hasilnya diumumkan.

Selain dari keunggulan-keunggulan yang telah disebutkan, tentu terdapat kekurangan dari program UNBK ini. Keterbatasan jumlah komputer, pasokan listrik, maupun jaringan internet memang masih menjadi kendala utama bagi sistem ujian berbasis komputer. Agar dapat mengadakan UNBK, suatu sekolah memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengantisipasi listrik padam saat ujian misalnya, sekolah perlu menyediakan genset yang dayanya mencukupi. Sayangnya, ketersediaan listrik, internet, dan komputer memang belum merata hingga ke pelosok-pelosok Nusantara. Tidak semua sekolah mampu menjalankan sistem CBT akibat terbatasnya sarana dan prasarana. Salah satu wilayah atau lokasi sekolah yang melaksanakan UNBK yaitu SMP Negeri 25 Pesawaran yang mulai menerapkan pada tahun 2018.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menambah dan melakukan perbaikan terhadap sejumlah gedung sekolah yang ada di Kabupaten Pesawaran, sekolah yang mampu melakukan ujian Nasional Berbasis Komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018. Menurut hasil pra-survey di lapangan, ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 25 Pesawaran yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Pesawaran Ibu Dra. Uniroh, diantaranya tidak adanya computer yang dimiliki oleh sekolah, baik laboratorium computer atau mata pelajaran computer itu sendiri. Kemudian jaringan internet yang tidak merata, selain adanya computer server dan client, syarat utama pelaksanaan UNBK adalah tersedianya jaringan internet yang stabil, kaitannya dengan wilayah yang jaringan internetnya sangat minim. Selanjutnya listrik yang mudah padam, hal pokok yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan UNBK adalah aliran listrik, walaupun computer tersedia, jaringan internet lancar, tetapi listrik sering kali padam karna daya listrik untuk menampung beberapa komputer di sekolah sangat banyak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *post-positivist*. Pendekatan ini memandang realitas tidak bisa ditangkap secara utuh, melainkan hanya bisa diperkirakan (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Data divalidasi dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan digital adalah ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari teknologi informasi karena kurangnya aksesibilitas dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi tersebut (Dewan & Riggins, 2005). *Digital divide* disebut juga kesenjangan digital, adalah masalah sosial mengacu pada perbedaaan dari informasi antara mereka yang memiliki akses ke Internet (akses khusus *broadband*) dengan mereka yang tidak memiliki akses.

Penyebab kesenjangan digital lebih dikarenakan oleh eksklusifitas sosial ekonomi yang bersumber dari masalah struktur. Solusi yang diajukan (Gelder, 2006) untuk memaksimalkan pembangunan dan menyelesaikan adanya kesenjangan melalui pemberian bantuan hanya berlaku ketika sumber masalah terdapat pada jumlah kepemilikan dan akses teknologi informasi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah unit komputer dan akses internet tidak serta merta meningkatkan kemampuan untuk mengakses informasi dari internet. Diperlukan pelatihan khusus agar masyarakat yang gagap teknologi bisa menggunakan internet dan memperoleh informasi yang diperlukan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya dari pengelolaan informasi tersebut (Dijk, 2000).

Istilah menjadi populer di kalangan pihak terkait, seperti para pelajar, pembuat kebijakan, dan kelompok-kelompok advokasi, pada akhir 1990-an. Persoalan *digital divide* atau kesenjangan (gap) pengetahuan dan praktik teknologi digital atau akses terhadap teknologi yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia khususnya Provinsi Lampung pada Kabupaten Pesawaran pada pelaksanaan UNBK dimulai pada tahun ajaran 2017/2018. Pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggungjawab dan kewenangan daerah oleh Pemerintah Provinsi.

Akses ke teknologi informasi merupakan kunci pembuka pintu untuk memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan. Begitu pula dengan akses internet, masyarakat dapat memperoleh segala informasi yang mereka butuhkan yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka (Nasution, 2007). Beberapa faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap kesenjangan digital antara lain:

61

Jalan akses telekomunikasi

Di dunia yang serba digital saat ini yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tahun 2015 misalnya, Kemendikbud mengadakan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara online. Hal ini memaksa para guru untuk berlatih menggunakan perangkat komputer. Para guru yang selama ini gagap (gagap teknologi) akan terkena dampaknya ketika baru belajar di usia yang tidak muda lagi. Hasilnya, UKG secara nasional nilai rata-ratanya 53,02. Padahal target pemerintah adalah nilai 55. Ini artinya secara umum, guru di Indonesia belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk mencapai keterampilan dalam penggunaan TIK kepada para guru yang kebanyakan sudah tidak muda lagi adalah hal yang tidak mudah, tetapi Kemendikbud berpengharapan besar kepada para siswa. Apalagi siswa-siswa sekarang mayoritas sudah akrab dengan gadget, smartphone, tablet, laptop atau komputer dan segala aplikasi yang ada di dalamnya. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebenarnya bukan hal yang baru. UNBK disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara *online* dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur. Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK. Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri. Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 4.382 sekolah yang terdiri dari 984 SMP/MTs, 1.298 SMA/MA, dan 2.100 SMK. Tahun 2017 menurut data yang dikutip di ubk.kemdikbud.go.id diperkirakan ada 5.865 sekolah yang melaksanakan UNBK, dan 3.257 sekolah yang bergabung (menumpang ujian) ke sekolah lain untuk melaksanakan UNBK.

SMP Negeri 25 Pesawaran adalah salah satu sekolah yang menumpang ujian kepada SMA Negeri 1 Padang Cermin karna keterbatasan alat computer dan jaringan internet di sekolah tersebut yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 25

Pesawaran Dra. Uniroh, dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis computer pertama kali dan memang masih menumpang pada SMA 1, ini dikarenakan bukan hanya tidak ada laboratorium komputer di sekolah tersebut, tetapi juga jaringan internet di sekolah juga tidak ada memadai. Mereka juga belum memiliki pengalaman untuk menyelenggarakan UNBK sama sekali, serta murid-murid yang belum mengenal dan belum tau bagaimana cara mengoperasikan computer.

Akses Internet

Infrastruktur dan akses internet di daerah Desa Sidodadi sudah cukup memadai sebagai daerah yang dekat dengan daerah wisata laut seperti Pantai Sari Ringgung, Pantai Dewi Mandapa, serta pahawang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesawaran Totok Sulistyio melalui media online kupatstuntas.co pada Selasa (23/05/2017): Untuk merealisasikan koneksi jaringan 4G di Pulau Pahawang, Pemkab Pesawaran menggandeng salah satu provider, PT Telkomsel. Harapannya, jaringan seluler dikawasan tersebut menjadi maksimal dan keindahan pulau pahawang dapat tersebar dan optimal. Untuk kompleks pemda akan tercover paling lambat 5 Juni, tapi sementara baru 3G.

Namun, fasilitas tersebut tidak didukung dengan tingkat ekonomi yang masih sangat rendah membuat warga sekitar tidak bias memanfaatkan fasilitas signal kuat tersebut selain karena banyak yang tidak mampu, tingkat pendidikan yang rendah pun menjadi masalah utama bahwa 76,67% warga sekitar hanya menempuh pendidikan sekolah dasar (Pratama, 2017). Hal ini juga disampaikan oleh warga sekitar yaitu BapakRimin yang mengatakan bahwa warga sekitar memilih untuk bekerja daripada sekolah, setelah lulus sekolah dasar, mereka langsungterbiasa mencari uang di kapal (tempat wisata).

Pencapaian pendidikan dan perbedaan akses bahasa

Menurut Pratama (2017) dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan mayoritas berpendidikan dasar sebanyak 23 orang dengan persentase (76,67%), dan tingkat pendidikan menengah sebanyak 7 orang dengan persentase (23,33%). Yang menarik disini tidak adanya kepala keluarga yang menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi melainkan banyak kepala keluarga yang berpendidikan dasar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga berada pada pendidikan dasar (SD/SMP). Rendahnya pendidikan kepala keluarga secara tidak langsung akan mempengaruhi ke pendidikan anaknya sendiri dikarenakan rendahnya pendapatan yang didapat dari hasil bekerja di objek wisata belum bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Namun jika dilihat dari segi sumber daya manusia, terdapat 19 tenaga pendidik (7 orang diantaranya sudah tersertifikasi) dan 7 orang tenaga kependidikan. Dari 19 tenaga pendidik, hanya dua orang yang memiliki keahlian bidang ilmu Bahasa Inggris.

Keterbatasan Guru di SMPN 25 Pesawaran dengan terbatasnya Guru yang bersertifikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada teknologi informasi. Guru yang professional dipersyaratkan mempunyai; 1) dasar ilmu yang kuat sebagai figur terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di era globalisasi, 2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia, 3) pengembangan kemampuan profesional berkelanjutan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan (Arifin, 2000).

Akses di kawasan kota lebih baik daripada desa

Akses ke teknologi informasi merupakan kunci pembuka pintu untuk memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan. Begitu pula dengan akses internet, masyarakat dapat memperoleh segala informasi yang mereka butuhkan yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka (Nasution, 2007).

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dikutip pada laman pojoksatu.id dalam pidatonya Mendikbud mengatakan sedikitnya ada tiga kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan. Menurut Muhadjir, tak ada perbedaan dalam pendidikan. Muhadjir menjelaskan, tiga jenis kesenjangan dalam pendidikan tersebut yakni; pertama kesenjangan struktural yang disebabkan karena kebijakan; kedua kesenjangan kultural karena budaya, misalnya ada orang yang masih menganggap pendidikan kurang penting. Ketiga kesenjangan spasial karena perbedaan desa dan kota. Yang tinggal di desa harus ada usaha lebih banyak untuk dapat mengakses pendidikan.

PENUTUP

Ada beberapa faktor penyebab kesenjangan digital terjadi di SMPN 25 Pesawaran yaitu faktor teknologi yang terkait dengan jalan ke akses telekomunikasi, serta faktor siswa sebagai pengguna yang belum melek akan TIK. Kondisi infrastruktur TIK di SMPN 25 Pesawaran sangat minim. Selain tidak adanya alat-alat computer yang ada disekolah, para siswa dan sisiwi SMP N 25 Pesawaran juga tidak dibekali dengan mata pelajaran computer yang sudah menjadi mata pelajaran wajib bila dibandingkan dengan sekolah yang berada diperkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari orang tua murid yang sangat rendah dan juga faktor geografis dimana SMPN 25 Pesawaran jauh dari pusat kota Bandar menyebabkan sulitnya pembangunan infrastruktur TIK.

Faktor kedua adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat di SMPN 25 Pesawaran masih banyak yang berada pada posisi menengah ke bawah sehingga TIK belum menjadi kebutuhan yang mendasar karena masih banyak masyarakat yang bergelut dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua adalah sumberdaya manusia di Desa Sidodadi masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Desa Sidodadi adalah SD sehingga berpengaruh pada kemampuan dalam mempelajari TIK..

ACKNOWLEDGEMENT

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas pendanaan penelitian melalui skema DIPA FISIP Universitas Lampung tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Pembangunan Teknologi*. Jakarta: BPS.
- Dewan, S. & Riggins, F. J. (2005): *The Digital Divide : Current and Future Research*
- Dijk, Jan van. (2000). The Digital Divide As a Complex and Dynamic Phenomenon. Dalam Ken Hacker & Jan Van Dijk. *Digital Democracy, Issues of Theory and Practices*. London: Sage
- Gelder, A. van. (2006). Fashion and Foreign Aid: A Realistic Look at The 'Digital Divide'. *Review-Institute of Public Affairs*, 58(1), 31-34.
- Nasution, Z. (2007). *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- OECD. (2001). *Understanding The Digital Divide*. Diakses pada tanggal 8 Juni 2018 dari OECD Publications: <http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/1888451.pdf>.
- Pratama, Y. (2017). *Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja di Objek Wisata Pantai Dewi Mandapa Desa Gebang Pesawaran*. Bandarlampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNILA.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Zulham. (2014). *Kesenjangan Digital Dikalangan Guru SMP*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.